

ANALISIS PERBANDINGAN PENGUNGKAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN PADA BANK UMUM KONVENSIONAL DAN BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA 2010-2013

Gita Danastri Putri

*Alumnus Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada,
Yogyakarta, Email: Gita.danastri@gmail.com*

Mahfud Sholihin

*Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
Email: mahfud@ugm.ac.id*

Abstract

This study aims to analyze the disclosure level of corporate governance report in the annual report of Conventional Commercial Bank (BUK) and Islamic Commercial Bank (BUS) in Indonesia in 2010-2013 with the indicators mentioned in the Bank Indonesia Regulation Number 8/4 / PBI / 2006 which was later revised by Bank Indonesia Regulation No. 8/14 / PBI / 2006 for the BUK and Bank Indonesia Regulation No. 11/33 / PBI / 2009 for BUS. In addition, this study analyzes and compares the growth rate of the disclosure. To achieve the objectives of the research, this study uses content analysis method. The results show that of the eight BUSs studied, only three banks (38%) provide corporate governance disclosure with more than 75%. While for the BUKs sampled, all provide corporate governance disclosure with more than 75%. Related to the growth of the disclosure, the average growth of disclosure for four years, for BUS is 6.27% and for BUK is 3.41%. The highest difference between the disclosure level of BUS and BUK is about 50%.

Keywords: *content analysis; Conventional Commercial Bank (BUK); Islamic Commercial Bank (BUS); disclosure; corporate governance;*

PENDAHULUAN

Perbankan merupakan industri dengan karakteristik khusus karena lebih dari 90% modalnya adalah utang (Mehran, 2011). Fungsi bank yang strategis dalam kehidupan masyarakat karena melibatkan dana masyarakat luas menjadikan banyak peraturan-peraturan terkait bank sehingga industri perbankan sering disebut juga *high regulated industry*.

Pembahasan mengenai regulasi dan peraturan usaha tidak bisa lepas dari tata kelola perusahaan (*corporate governance*). Tata kelola

perusahaan telah menarik banyak perhatian baik praktisi maupun peneliti sejak pertengahan 1980-an (Abu-Tapanjeh, 2009). Isu tata kelola perusahaan juga menjadi perhatian khusus baik lembaga internasional seperti OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*) serta ICGN (*International Corporate Governance Network*) maupun lembaga nasional seperti Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri dan Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI).¹ Pentingnya tata

kelola ini ditegaskan dari pernyataan OECD bahwa tata kelola perusahaan perlu menjadi prinsip dasar dan tidak sekedar menjadi aturan dan regulasi (OECD, 2004).

Tata kelola pada bank juga menjadi perhatian Bank Indonesia (BI), terbukti dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 yang kemudian direvisi dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006. Awal mulanya peraturan ini berlaku baik bagi bank konvensional (BUK) maupun bank umum syariah (BUS). Adanya pertumbuhan bank syariah di Indonesia yang cukup cepat menyebabkan BI mengeluarkan regulasi tata kelola perbankan yang terpisah untuk BUK dan BUS. Oleh karena itu pada tahun 2009 BI mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009. Kedua peraturan ini mengatur persyaratan minimum tata kelola perusahaan serta pedoman pelaporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG).

Adiono dan Sholihin (2014) telah melakukan penelitian tentang pengungkapan tata kelola perusahaan pada bank syariah di Indonesia tahun 2010-2012. Menggunakan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 sebagai acuan, mereka menemukan bahwa Bank Syariah Mandiri, BCA Syariah, dan Bank Muamalat memiliki tingkat pengungkapan paling tinggi dibandingkan bank syariah lain di Indonesia. Meski penelitian tersebut memberi pemahaman kepada kita terkait luas pengungkapan dan pertumbuhan pengungkapan tata kelola perusahaan pada bank syariah, ada beberapa pertanyaan penting yang belum dijawab oleh penelitian tersebut. Diantara pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah: 1) Bagaimana luas pengungkapan dan pertumbuhan pengungkapan tata kelola perusahaan pada bank umum konvensional?; 2) Bagaimana perbandingan luas pengungkapan dan pertumbuhan pengungkapan tata kelola perusahaan pada bank umum konvensional dan bank umum syariah?

Penelitian ini akan menjawab dua pertanyaan tersebut. Penelitian ini menggunakan acuan

syarat minimum pelaporan tata kelola perusahaan sesuai PBI Nomor 8/14/PBI/2006 untuk BUK dan PBI Nomor 11/33/PBI/2009 untuk BUS. Penggunaan peraturan tersebut sebagai *benchmark* dinilai lebih sesuai dengan keadaan di Indonesia dan dianggap mampu mencerminkan tingkat informasi yang diharapkan regulator dibanding menggunakan standar yang lain (Adiono dan Sholihin, 2014). Laporan tahunan yang digunakan adalah laporan tahun 2010 sampai 2013. Adapun metode yang dipakai adalah metode *content analysis*.

Kontribusi penelitian ini adalah membandingkan pengungkapan tata kelola antara BUK dan BUS yang ada di Indonesia dan secara spesifik mempertemukan antara bank konvensional dengan bank syariah dengan posisi induk-anak maupun yang bernaung dalam satu *holding company* yang sama. Pemilihan memperbandingkan perusahaan dengan prinsip operasi yang berbeda dilandaskan pada dua alasan. Pertama, hampir seluruh BUS yang ada merupakan anak perusahaan dari bank umum maupun berada dalam satu *holding company* yang sama. Kedua, untuk mengetahui pengungkapan tata kelola mana yang lebih baik antara yang dilakukan BUS dengan BUK berdasarkan PBI tentang *Good Corporate Governance*.

METODE

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh BUS dan BUK yang ada di Indonesia. Penyampelan dilakukan menggunakan metode *purposive sampling* dan sampel yang dipilih adalah:

1. Bank umum dan Bank Umum Syariah yang memiliki hubungan induk-anak maupun bernaung dalam satu *holding company* yang sama.
2. Ketersediaan informasi dari website perusahaan yang dapat diunduh secara bebas berupa laporan tahunan 2010-2013 yang memuat laporan tata kelola perusahaan di dalamnya.

Daftar bank yang digunakan dalam penelitian ini ada di tabel 1. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan 2010 hingga 2013. Data diunduh dari *website* masing-masing bank. Fokus penelitian adalah pada bagian tata kelola perusahaan dari laporan tahunan karena bagian tersebut telah dianggap cukup untuk melakukan pemahaman tentang tata kelola perusahaan (Chatterjee, 2011). Namun, apabila ditemukan kriteria yang dibutuhkan pada bagian lain maka temuan tetap akan diberi nilai (Adiono dan Sholihin, 2014).

Krippendorff (1980) menyatakan ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam analisis isi yaitu reliabilitas dan validitas.

Reliabilitas adalah kemampuan penelitian untuk menghasilkan pernyataan yang sama atas data yang sama dalam berbagai proses pengukuran dan validitas adalah kemampuan instrumen untuk mengukur hal yang diinginkan dalam menggambarkan kebenaran. Dalam upaya meningkatkan reliabilitas dan validitas penelitian, maka verifikasi data dilakukan oleh dua orang dalam pemasukan data dan dilanjutkan dengan

Tabel 1. Daftar Sampel Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional

No	Nama BUS	Singkatan	Nama Bank Umum	Singkatan
1	PT. Bank BNI Syariah	BNIS	PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	BNI
2	PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk	BSM	PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk	Mandiri
3	PT. Bank Syariah Mega Indonesia	BSMI	PT. Bank Mega Indonesia, Tbk	BMI
4	PT. Bank BCA Syariah	BCAS	PT. Bank Central Asia, Tbk	BCA
5	PT. Bank BRI Syariah	BRIS	PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	BRI
6	PT. Bank Syariah Bukopin	BSB	PT. Bank Bukopin	Bukopin
7	PT. Bank Panin Syariah	BPS	PT. Bank Panin	Panin
8	PT. Bank Victoria Syariah	BVS	PT. Bank Victoria International	BVI

Data berupa laporan tahunan yang telah diperoleh kemudian diolah dan dianalisis menggunakan 15 indikator dalam pasal 62 ayat (2) dan (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 untuk BUS dan untuk BUK menggunakan 13 indikator dalam pasal 61 ayat (2) dan (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 yang telah diperbaharui menjadi Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006.

Metode yang digunakan adalah metode analisis isi (*content analysis*) yaitu metode untuk mengkodifikasi teks menjadi bagian kategori pada kriteria yang dipilih (Krippendorff, 1980).

diskusi jika ada perbedaan yang muncul (Adiono dan Sholihin, 2014).

Penelitian ini menggunakan *checklist* (daftar) yang disiapkan berdasarkan dua Peraturan Bank Indonesia yang menjadi *benchmark*. Nilai yang diberikan adalah '1' untuk informasi yang didapatkan sesuai indikator dan '0' untuk informasi yang tidak tersedia pada laporan tahunan yang digunakan. Apabila terdapat lebih dari satu kriteria dari indikator yang dimaksud maka tiap kriteria akan mendapat nilai '1' bila ada dan '0' bila tidak dan total nilai dari indikator tersebut merupakan rata-rata dari kriterianya.

Contoh pada indikator ketiga dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 untuk BUS yang memiliki dua kriteria maka apabila hanya ditemukan satu saja kriteria yang dimaksud, indikator ketiga tersebut nilainya 0,5. Nilai maksimum yang akan diperoleh adalah 15 untuk BUS dan 13 untuk BUK. Pendekatan ini pernah dilakukan sebelumnya oleh Chatterjee (2011), Darmadi (2011), dan Adiono dan Sholihin (2014).

HASIL PENELITIAN

Peringkat Pengungkapan Tata Kelola BUS dan Rata-rata per Indikator

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BSM memegang peringkat paling tinggi dengan tingkat pengungkapan 96,67%. BCAS menduduki posisi kedua dengan persentase pengungkapan 93,33%. Posisi paling bawah dengan nilai 29,45% adalah Bank Victoria Syariah. Dari delapan sampel yang digunakan, hanya tiga dari delapan bank yang mengungkapkan tata kelola perusahaannya dengan skor lebih dari 75%, yaitu BSM, BCAS, dan BNIS.

Rata-rata per indikator tertinggi diungkapkan pada indikator dana kegiatan sosial. Hal ini dimungkinkan karena walaupun tidak semua BUS mencantumkannya secara spesifik pada bagian laporan tata kelola, pengungkapan dana kegiatan sosial ini dapat ditemukan pada laporan keuangan yang biasanya terlampir bersama laporan tahunan perusahaan, maupun bagian tersendiri yang membahas *Corporate Social Responsibility* (CSR) seperti yang terdapat pada BSMI. BVS pada tahun 2010 hingga 2011 tidak menggunakan dana kegiatan sosial namun terdapat penjelasan dalam laporan tahunannya dan baru mulai menggunakan dana tersebut pada tahun 2012.

Frekuensi rapat dewan komisaris memiliki nilai pengungkapan yang cukup tinggi yaitu mencapai 91%. Indikator ini tidak ditemukan pada BSMI tahun 2010, BPS tahun 2011, dan BVS tahun 2012. Bank lain selalu mengungkapkan frekuensi rapat dewan komisaris. Rata-rata yang

tinggi juga dimiliki pada pengungkapan remunerasi dan fasilitas lain. Namun, dari hampir semua yang mengungkapkan indikator ini, hanya BSM, BNIS, dan BCAS saja yang setiap tahun mengungkapkan jumlah remunerasi dan fasilitas yang didapatkan dewan komisaris, direksi, dan Dewan Pengawas Syariah. Selain ketiga bank tersebut kebanyakan hanya terbatas pada pengungkapan jumlah anggota dewan saja yang itupun bukan ditemukan pada bagian tata kelola namun pada bagian profil perusahaan.

Pendapatan non-halal mendapatkan peringkat berikutnya sebagai pengungkapan yang mendapatkan nilai cukup tinggi karena kebanyakan diungkapkan pada laporan keuangan pada bagian sumber dan penggunaan dana kebajikan. Rangkap jabatan DPS dan frekuensi rapat DPS menduduki urutan selanjutnya. Pengungkapan rangkap jabatan ini beragam. Ada yang menyebutkan secara rinci di lembaga apa saja mereka menjabat, namun ada pula yang hanya secara ringkas menyebutkan bahwa persyaratan rangkap jabatan DPS telah sesuai dengan perundangan yang berlaku maupun menyatakan yang bersangkutan telah mengungkapkannya. Namun selama tiga tahun berturut-turut BPS tidak menyebutkan rangkap jabatan yang dimaksud dan baru pada tahun 2013 BPS mengungkapkannya.

Independensi direksi dan independensi dewan komisaris menjadi peringkat selanjutnya dengan nilai pengungkapan 77% dan 76%. Namun tidak semua BUS mengungkapkan bagian ini secara lengkap. Pada BRIS tahun 2011 indikator independensi baik independensi dewan komisaris maupun direksi, tidak dijelaskan secara terperinci dan hanya dikatakan bahwa independensi telah sesuai dengan perundangan yang berlaku. Setelah itu pada tahun 2012 BRIS mengungkapkan secara lengkap mengenai independensi dewan komisaris dan direksi. Pada BNIS sebelum tahun 2013 rangkap jabatan anggota dewan komisaris belum diperinci dan baru setelahnya pengungkapan dilakukan secara lebih rinci. Kesimpulan *self assessment* sama

Tabel 2. Peringkat Pengungkapan dan Rerata per Indikator Tata Kelola Bank Umum Syariah

1	Kesimpulan umum self assesment	C (8)	1 (1)	1 (1)	0,50 (6)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	0,25 (7)	72% (9)
2	Indapentansi dewan komisaris	0,50 (3)	1 (6)	0,50 (6)	0,33 (5)	1 (1)	1 (1)	0,97 (3)	0,19 (8)	76% (8)
3	Indapentansi dewan direksi	1 (1)	0,33 (7)	0,50 (6)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	0,75 (5)	0,75 (7)	77% (7)
4	Ratopak jabatan DPS	1 (1)	0,25 (8)	0,75 (5)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	0,75 (5)	0,50 (7)	78% (5)
5	Datar konsultan, penasihat, atau yang dapat dipersamakan	C (5)	0,25 (2)	0 (5)	0,25 (2)	0,50 (1)	0,25 (2)	0 (5)	0 (5)	16% (15)
6	Kebijakan remunerasi dan fasilitas lain	0,41 (5)	0,01 (5)	0,75 (7)	0,03 (4)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	0,75 (7)	00% (3)
7	Rasio uji selinggidan terendal	C (5)	0,25 (4)	0 (5)	0 (5)	1 (1)	1 (1)	0,75 (3)	0 (5)	30% (14)
8	Frekuensi rapat komisaris	0,15 (6)	0,75 (6)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	0,15 (6)	91% (2)
9	Frekuensi rapat DPS	0,15 (6)	0,25 (7)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	0,25 (7)	78% (5)
10	Jumlah penyimpangan (internal fraud)	0,25 (5)	0,50 (4)	0 (7)	0,25 (5)	1 (1)	1 (1)	0,75 (3)	0 (7)	47% (12)
11	Jumlah pemecatan hulum	C (6)	1 (1)	0 (6)	0,50 (5)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	0 (6)	50% (11)
12	Transaksi dengan mitraan kepinginan	0,75 (4)	0,75 (4)	0,50 (7)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	0,75 (4)	0 (8)	72% (9)
13	Ruyhark sharee/ rhligasi	C (6)	0,25 (4)	0 (6)	0,75 (3)	1 (1)	1 (1)	0,25 (4)	0 (6)	41% (13)
14	Dana kejatan sosial	1 (1)	0,75 (7)	0,75 (5)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	94% (1)
15	Pendapatan non-halal	1 (1)	0,75 (5)	0,75 (5)	0,50 (8)	1 (1)	0,75 (5)	1 (1)	1 (1)	84% (4)
	Total	8,13 (5)	54,87% (5)	56,23% (5)	10,46 (4)	14,50 (1)	14,50 (1)	12,17 (3)	5,17 (8)	10,06 (4)
	Percentase pengungkapan	54,87% (5)	56,23% (5)	50,00% (7)	69,72% (4)	96,57% (1)	93,33% (2)	81,12% (3)	34,45% (8)	67,05% (8)

Keterangan: angka dalam kurung merupakan peringkat yang diperoleh

sekali tidak ditemukan pada laporan tata kelola BSMI pada empat tahun terakhir publikasi laporan tahunannya. Sebagian yang lain mengungkapkan kesimpulannya saja namun ada pula yang menjelaskan secara terperinci menggunakan 11 indikator penilaian seperti yang dilakukan BSM. Namun ada juga yang hanya menyebutkan kesimpulan secara umum seperti pada BNIS 2012 dan BSB 2012. BVS baru mulai mengungkapkan kesimpulan *self assessment* pada tahun 2013.

Transaksi dengan benturan kepentingan dalam empat tahun berturut-turut selalu diungkapkan oleh tiga bank yaitu BSB, BSM, dan BCAS. Jumlah permasalahan hukum juga selalu dilaporkan secara konsisten oleh empat bank yaitu BPS, BSM, BCAS, dan BNIS. Sedangkan indikator jumlah penyimpangan internal hanya konsisten dilaporkan oleh dua bank saja yaitu BSM dan BCAS, sedangkan BRIS dan BVS sama sekali tidak pernah mengungkapkan hal ini dalam kurun empat tahun terakhir. Indikator *buyback shares/obligasi* tidak ditemukan sama sekali pada tiga bank pada periode yang diteliti yaitu BRIS, BSMI, dan BVS sedangkan hanya BSM dan BCAS saja yang mengungkapkannya secara konsisten.

Rasio gaji tertinggi dan terendah sama sekali tidak diungkapkan oleh empat bank berikut: BSMI, BRIS, BSB, dan BVS. Sedangkan BPS baru mengungkapkannya pada tahun 2013. Nilai pengungkapan terendah ditemukan pada indikator daftar konsultan atau penasihat yang tidak ada satupun bank yang telah mengungkapkannya secara konsisten selama empat tahun terakhir.

Peringkat Pengungkapan Tata Kelola BUK dan Rata-rata per Indikator

Nilai pengungkapan tata kelola pada BUK ditemukan bahwa BRI, Mandiri, dan BNI maksimal, artinya melakukan 100% pengungkapan tata kelola seperti yang disyaratkan oleh Bank Indonesia. Selain ketiga bank tersebut, bank lain yang dijadikan sampel

tidak ada yang nilai pengungkapannya kurang dari 75% seperti yang ditunjukkan dalam tabel 3.

Bank BCA mengungkapkan sebesar 97% sedangkan Bank Mega menduduki posisi berikutnya dengan perolehan nilai sebesar 94% disusul kemudian oleh Bank Panin yang memperoleh 89%. Hanya ada dua bank yaitu Bank Bukopin dan Bank Victoria yang memperoleh nilai kurang dari 80% dengan masing-masing memperoleh 79% dan 77%. Rata-rata keseluruhan pengungkapan tata kelola pada BUK mencapai 92%.

Rata-rata pengungkapan per indikator paling tinggi ada pada frekuensi rapat dewan komisaris. Seluruh bank mengungkapkannya sehingga persentase pengungkapan sebesar 100%. Kemudian indikator pertama yaitu pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang memiliki tujuh kriteria ada pada tempat kedua dengan persentase pengungkapan sebesar 99%. Bank Panin tidak melaporkan kriteria penyediaan dana pada pihak terkait tahun 2010 dan 2013 sehingga tidak memiliki persentase pelaporan 100%. Independensi dewan komisaris dan direksi serta jumlah permasalahan hukum adalah tiga indikator dengan persentase pelaporan yang sama yaitu sebesar 97%. Seluruh bank melaporkan independensi dewan komisaris dan direksinya dengan lengkap kecuali pada Bank Victoria pada laporan tahunan tahun 2010 tidak ditemukan indikator yang dimaksud. Sedangkan Bank Panin baru mulai mengungkapkan indikator masalah hukum pada laporan tahun 2011.

Transaksi yang mengandung benturan kepentingan memiliki rata-rata pengungkapan sebesar 94%. Bank Mega pada tahun 2010 tidak menjelaskan indikator transaksi yang mengandung benturan kepentingan pada bagian pelaporan GCG namun ditemukan pada bagian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Jumlah penyimpangan internal, kebijakan remunerasi, dan *buy back shares* dan/obligasi memiliki persentase pengungkapan yang sama yaitu sebesar 91%. Bank Mega pada laporan

Tabel 3
Peringkat Pengungkapan dan Rerata per Indikator Tata Kelola Bank Umum

1	Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG	1 (1)	0,89 (8)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	0,99 (2)
2	Kesimpulan self assessment	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	0 (8)	0,88 (10)
3	Independensi dewan komisaris	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	0,75 (8)	0,97 (3)
4	Independensi dewan direksi	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	0,75 (8)	0,97 (3)
5	Paket/kabijakan remunerasi	1 (1)	0,75 (6)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	0,75 (6)	0,91 (7)
6	Shares option yang dimiliki komisaris, direksi, dan pejabat eksekutif	0,5 (6)	0,75 (5)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	0,75 (5)	0,78 (13)
7	Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah	1 (1)	0,5 (8)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	0,75 (6)	0,88 (10)
8	Frukuensi rapat dewan komisaris	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1,00 (1)
9	Jumlah penyimpangan (internal fraud) yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh bank	0,75 (6)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	0,75 (6)	0,91 (7)
10	Jumlah permasalahan hukum dan upaya penyelesaian oleh bank	1 (1)	0,75 (8)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	0,97 (3)
11	Transaksi yang mengandung benturan kepentingan	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	0,94 (6)
12	Buy back shares dan/atau buy back obligasi bank	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	0,75 (8)	0,91 (7)
13	Pembeian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik	0,63 (7)	0,75 (5)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	0,63 (4)	0,83 (12)
Total nilai pengungkapan		11,88 51%	11,39 50%	13,00 100%	13,00 100%	13,00 100%	13,00 100%	10,38 80%	11,91 92%
Total persentase pengungkapan		4	6	1	1	1	1	7	8

Keterangan: angka dalam kurung menunjukkan peringkat yang diperoleh

tahun 2012 dan 2013 tidak menyebutkan jumlah penyimpangan internal yang terjadi namun menjelaskan mekanisme yang dilakukan untuk mencegah dan menangani penyimpangan internalnya sehingga hanya mendapat poin 0,5 pada tahun tersebut. Rasio gaji tertinggi dan terendah serta kesimpulan *self assessment* memiliki angka pengungkapan sebesar 88%. Pada laporan tahunan Bank Bukopin pada 2011 kesimpulan *self assessment* disusulkan pada dokumen terpisah. Namun tidak ada penjelasan apa yang menyebabkan kesimpulan tersebut berada pada dokumen terpisah.

Indikator terakhir yaitu pemberian dana untuk kegiatan politik dan sosial memiliki persentase pengungkapan sebesar 83%. Indikator terakhir ini yang menjadikan BCA tidak mendapatkan persentase pengungkapan penuh karena pada tahun 2010-2012 BCA hanya mengungkapkan penyediaan dana bagi kegiatan sosial saja dan tidak ditemukan keterangan mengenai penyediaan dana bagi kegiatan politik. *Shares option* memiliki persentase pengungkapan paling rendah yaitu 78%. Meskipun begitu angka pengungkapan masing-masing indikator yang paling rendah sekalipun tidak kurang dari 75%.

Pertumbuhan Pengungkapan Tata Kelola BUS dan BUK per Tahun

Pertumbuhan pengungkapan tata kelola ini dibagi berdasarkan pertumbuhan yang terjadi pada pengungkapan masing-masing bank dan pertumbuhan pengungkapan masing-masing indikator yang digunakan.

Pertumbuhan Pengungkapan Tata Kelola Bank Umum Syariah

Pertumbuhan pengungkapan tata kelola pada BUS paling tinggi adalah 14% pada Bank Panin Syariah. Meskipun pada tahun 2010 ke 2011 sempat mengalami pertumbuhan yang negatif paling tinggi mencapai -30%, namun berubah drastis pada pertumbuhan tahun 2012 ke tahun 2013 yang tumbuh sebesar 59%. Hal ini begitu mencolok karena laporan tahunan tahun 2013 Bank Panin Syariah pengungkapan tata kelola

yang dilakukan mencapai 100%. Peringkat selanjutnya ditempati oleh BSMI dengan angka pertumbuhan 10%. BRIS, BSB, dan BVS memiliki tingkat pertumbuhan yang sama yaitu 9%. Sedangkan BSM hanya memiliki tingkat pertumbuhan 2% dikarenakan pengungkapan BSM sudah cukup tinggi dan memiliki peringkat tertinggi dalam pengungkapan tata kelola.

BNIS memiliki tingkat pertumbuhan sebesar 1% saja. Sementara BCAS malah memiliki tingkat pertumbuhan pengungkapan yang negatif. Rata-rata pertumbuhan semua bank hanya mencapai 6%. Jika mempertimbangkan baru ada tiga dari delapan BUS yang melakukan pengungkapan lebih dari 75%, maka angka pertumbuhan rata-rata hanya mencapai 6% dapat digolongkan angka pertumbuhan yang cukup kecil. Pertumbuhan Pengungkapan tata kelola BUS disajikan pada tabel 4.

Pertumbuhan Pengungkapan per Indikator BUS

Jika yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan adalah per indikator, maka peringkat pertama yang mengalami pertumbuhan paling tinggi adalah indikator independensi Dewan komisaris sebesar 14%. Hal ini terjadi karena pada tahun 2013 pengungkapan indikator ini mencapai 100% yang artinya semua bank melakukan pengungkapan. Disusul kemudian oleh frekuensi rapat DPS dan *buy back shares/ obligasi* dengan perolehan 13%, independensi Direksi 10%, dan rangkap jabatan DPS bertumbuh sebesar 8%. Selebihnya indikator lain berada pada level pertumbuhan kurang dari 4%. Pertumbuhan Pengungkapan per Indikator disajikan pada tabel 5.

Tingkat pertumbuhan yang stagnan terjadi pada indikator rasio gaji tertinggi dan terendah, dimana tidak terdapat pertumbuhan sama sekali atau 0%. Pengungkapan indikator ini hanya mencapai 38% selama empat tahun berturut-turut. Banyak bank yang tetap konsisten tidak mengungkapkan rasio gaji tertinggi dan terendahnya selama empat tahun berturut-turut.

Tabel 4. Pertumbuhan Pengungkapan Tata Kelola BUS

No	Kode Bank	Nilai Pengungkapan				Pertumbuhan per Tahun			Rata-rata Pertumbuhan
		2010	2011	2012	2013	2010-2011	2011-2012	2012-2013	
1	BSMI	36% (6)	58% (5)	58% (5)	67% (8)	22% (1)	0% (5)	8% (4)	10% (2)
2	BPS	57% (4)	27% (7)	41% (7)	100% (1)	-30% (8)	13% (2)	59% (1)	14% (1)
3	BRIS	32% (7)	52% (6)	58% (5)	58% (6)	20% (2)	7% (3)	0% (5)	9% (3)
4	BSB	52% (5)	61% (4)	87% (3)	80% (5)	9% (3)	26% (1)	-7% (7)	9% (3)
5	BSM	93% (2)	93% (1)	100% (1)	100% (1)	0% (5)	7% (3)	0% (5)	2% (6)
6	BCAS	100% (1)	93% (1)	93% (2)	87% (3)	-7% (6)	0% (5)	-7% (7)	-4% (8)
7	BNIS	84% (3)	87% (3)	67% (4)	87% (3)	2% (4)	-20% (8)	20% (3)	1% (7)
8	BVS	32% (7)	25% (8)	23% (8)	58% (6)	-7% (6)	-2% (7)	36% (2)	9% (3)
Rata-rata pertumbuhan semua bank									6,27%

Keterangan: Angka dalam kurung merupakan peringkat yang diperoleh

Pertumbuhan Pengungkapan Tata Kelola BUK

Pertumbuhan pengungkapan tata kelola pada BUK paling tinggi terjadi pada Bank Victoria dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 19% seperti yang tersaji pada tabel 6. Hal ini terjadi karena laporan tahunan pada 2010 hanya mengungkapkan sebesar 33% persen saja dari indikator yang digunakan. Namun mulai tahun 2011, Bank Victoria membuat perubahan yang drastis dengan mengungkapkan 92% dari indikator yang ditentukan. Sayangnya perubahan yang pesat ini malah menurun pada tahun 2012 ke persentase 88% kemudian kembali pada persentase 92% ditahun 2013.

Bank Panin memiliki pertumbuhan pengungkapan sebesar 8% dikarenakan pada tahun 2010 mereka baru mengungkapkan tata kelolanya sebesar 67% yang kemudian pada tahun 2011 dan 2012 langsung meningkat menjadi 96%. Hanya saja tahun 2013 nilai pengungkapan berkurang menjadi 91% karena ketiadaan pengungkapan rasio gaji tertinggi dan terendah.

Tiga bank dengan peringkat tertinggi dalam melakukan pengungkapan yaitu BRI, Mandiri, dan BNI memiliki tingkat pertumbuhan 0% dikarenakan selalu konsisten melakukan pengungkapan sebesar 100% dari tahun ke tahun. Bank Bukopin memiliki angka pertumbuhan 3% dan BCA memiliki pertumbuhan 1% karena pada tahun 2013 BCA mengungkapkan pemberian dana untuk kegiatan politik yang tidak pernah disinggung pada tahun-tahun sebelumnya. Bank Mega memiliki angka pertumbuhan yang negatif yaitu sebesar -4% karena mengalami penurunan pengungkapan dari tahun 2011 yang 100% menjadi 85% pada tahun 2012 dan 2013 karena tidak ditemukannya indikator *shares option* dan jumlah penyimpangan (*internal fraud*) pada tahun tersebut.

Pertumbuhan Pengungkapan per Indikator BUK

Pertumbuhan indikator paling tinggi ada pada paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi dewan komisaris dan Direksi dengan nilai 8%

Tabel 5. Pertumbuhan Pengungkapan per Indikator

1	Kesimpulan umum self assessment:	63% (8)	75% (6)	88% (8)	0%	13% (4)	13% (7)	8%
2	Injendpersi dewan komisaris	58% (10)	88% (3)	100% (1)	0%	29% (1)	13% (7)	14% (1)
3	Injendpersi dewan direksi	69% (7)	75% (6)	100% (1)	-6% (14)	13% (4)	25% (3)	10% (4)
4	Ranokap jabatan DPS	75% (4)	63% (9)	100% (1)	0%	-13% (13)	38% (1)	8% (5)
5	Daftar konsultan, penasihat, atau yang dapat dipersamakan	15% (15)	25% (14)	25% (15)	-13% (15)	25% (2)	0%	4% (7)
6	Kebijakan remunerasi dan fasilitas lain	84% (3)	88% (3)	94% (7)	0%	3% (9)	6% (10)	3% (13)
7	Rasio gaji tertinggi dan terendah	38% (13)	38% (12)	38% (14)	0%	0%	0%	0%
8	Frekuensi rapat komisaris	88% (1)	88% (3)	100% (1)	0%	0%	13% (7)	4% (7)
9	Frekuensi rapat DPS	63% (8)	75% (6)	100% (1)	3% (1)	0%	25% (3)	13% (2)
10	Jumlah penyimpangan (internal fraud)	50% (11)	25% (14)	63% (11)	0%	-25% (14)	38% (1)	4% (7)
11	Jumlah permasalahan hukum	50% (11)	63% (9)	63% (11)	0%	13% (4)	0%	4% (7)
12	Transaksi dengan benturan kepentingan	75% (4)	50% (11)	75% (10)	3% (1)	38% (15)	25% (3)	0% (14)
13	Duy back slares/ objyasi	25% (14)	30% (12)	30% (11)	3% (1)	0%	25% (3)	13% (2)
14	Dana kegiatan sosial	63% (1)	100% (1)	100% (1)	0%	13% (4)	0%	4% (7)
15	Pendapatan non-lahel	75% (4)	100% (1)	66% (8)	0%	25% (2)	-13% (15)	4% (7)

Keterangan: angka dalam kurung merupakan peringkat yang diperoleh

Tabel 6. Pertumbuhan Pengungkapan Bank Umum

No	Kode Bank	Nilai Pengungkapan				Pertumbuhan per Tahun			Rata-rata Pertumbuhan
		2010	2011	2012	2013	2010-2011	2011-2012	2012-2013	
1	BMI	96% (4)	100% (1)	85% (7)	85% (7)	4% (4)	-15% (8)	0% (4)	-4% (8)
2	Panin	67% (7)	96% (5)	96% (4)	91% (6)	29% (2)	0% (1)	-5% (8)	8% (2)
3	BRI	100% (1)	100% (1)	100% (1)	100% (1)	0% (5)	0% (1)	0% (4)	0% (5)
4	Bukopin	77% (6)	85% (8)	73% (8)	85% (7)	8% (3)	-12% (7)	12% (1)	3% (3)
5	Mandiri	100% (1)	100% (1)	100% (1)	100% (1)	0% (5)	0% (1)	0% (4)	0% (5)
6	BCA	96% (4)	96% (5)	96% (4)	100% (1)	0% (5)	0% (1)	4% (2)	1% (4)
7	BNI	100% (1)	100% (1)	100% (1)	100% (1)	0% (5)	0% (1)	0% (4)	0% (5)
8	Victoria	35% (8)	92% (7)	88% (6)	92% (5)	58% (1)	-4% (6)	4% (2)	19% (1)
Rata-rata pertumbuhan pengungkapan									3,41%

Keterangan: angka dalam kurung merupakan peringkat yang diperoleh

walaupun sempat mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Peringkat kedua yang memiliki pertumbuhan pengungkapan sebesar 6% adalah *internal fraud* yang terjadi karena pada tahun 2011 semua bank mengungkapkan jumlah *internal fraud* yang terjadi. Pengungkapan yang tumbuh sebesar 4% adalah indikator independensi dewan komisaris, independensi Direksi, *shares option*, rasio gaji, dan pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik. Cakupan GCG hanya mengalami pertumbuhan 1% karena pengungkapan indikator ini sudah hampir maksimal diungkapkan oleh tiap-tiap bank.

Dari hasil penelitian, terdapat tiga indikator yang tidak mengalami pertumbuhan sama sekali yaitu kesimpulan *self assessment*, frekuensi rapat dewan komisaris, dan *buy back shares* dan/obligasi. Kesimpulan *self assessment* tetap stagnan pada level 75% selama empat tahun berturut-turut. Sedangkan frekuensi rapat dewan komisaris perkembangannya tetap stagnan karena indikator ini sudah diungkapkan secara

maksimal. Sedangkan *buy back shares* sempat mengalami fluktuasi namun memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 0%.

Perbandingan Pengungkapan Tata Kelola Antara BUK dan BUS

Dari delapan BUS dan BUK yang dijadikan sampel, ditemukan bahwa BRIS dan BRI adalah bank yang memiliki ketimpangan pengungkapan yang paling besar yaitu 50%. BRI sebagai perusahaan induk dari BRIS memiliki rata-rata pengungkapan yang maksimal yaitu 100%. Sedangkan BRIS sebagai anak perusahaannya, baru memiliki rata-rata pengungkapan sebesar 50%. Peringkat kedua yang memiliki ketimpangan cukup tinggi adalah Bank Victoria dan Bank Victoria Syariah. Selisih yang terjadi sebesar 42,47%. Baik Bank Victoria maupun anak perusahaannya yaitu Bank Victoria Syariah keduanya memiliki nilai pengungkapan yang paling rendah jika dibandingkan dengan tujuh bank lainnya.

Tabel 7. Pertumbuhan Pengungkapan per Indikator pada Bank Umum

1	Falakanan prinsip-prinsip GCG	0,96 (2)	1 (1)	1 (1)	0,98 (7)	4% (10)	0% (2)	-2% (12)	1% (0)
2	Kecimulular self assessment	0,75 (9)	0,75 (3)	0,75 (12)	0,75 (12)	0% (11)	0% (2)	0% (3)	0% (11)
3	Keperubansi Dewan Komisaris	0,88 (3)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	13% (5)	0% (2)	0% (3)	-2% (3)
4	Independensi dewan direksi	0,88 (3)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	13% (5)	0% (2)	0% (3)	2% (3)
5	Faket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi dewan komisaris serta direksi	0,75 (8)	1 (1)	0,88 (8)	1 (1)	25% (1)	-13% (10)	13% (2)	3% (1)
6	Shares option yang dimiliki komisaris direks, dan pejabat eksekutif	0,63 (12)	0,88 (0)	0,88 (8)	0,75 (12)	25% (1)	0% (2)	-12% (13)	1% (3)
7	Haslo gaji tertinggi dan gaji terendah	0,75 (9)	1 (1)	0,88 (8)	0,88 (10)	25% (1)	-13% (10)	0% (3)	2% (3)
8	Frekuensi rapat dewan komisaris	1 (1)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	0% (11)	0% (2)	0% (3)	0% (11)
9	Jumlah penyimpanan (internal taud) yang terjadinya upaya penyelesaian oleh bank	0,75 (9)	1 (1)	0,94 (7)	0,94 (8)	25% (1)	-5% (9)	0% (3)	0% (2)
10	Jumlah pemasaah hukum dan upaya penyelesaian oleh bank	0,88 (3)	1 (1)	1 (1)	1 (1)	13% (5)	0% (2)	0% (3)	2% (3)
11	Transaksi yang mengandung benturan kepentingan	0,88 (3)	0,88 (0)	1 (1)	1 (1)	0% (10)	13% (1)	0% (3)	-2% (3)
12	Buy back shares dan/atau buy back obligasi bank	0,88 (3)	1 (1)	0,88 (8)	0,88 (10)	13% (5)	-13% (10)	0% (3)	0% (11)
13	Femberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik	0,81 (9)	0,88 (0)	0,69 (13)	0,94 (9)	6% (9)	-19% (13)	25% (1)	2% (3)

Keterangan: angka dalam kurung merupakan peringkat yang diperoleh

Tabel 3. Perbandingan Pengungkapan BUS dan EUK

Nama Bank Syariah dan Bank Umum															
DSMI	DM	DPS	Panin	IRIS	DFI	DSD	Bukopin	D3M	Manjini	DCAI	DCA	DNS	DNI	LVS	D/I
36,13%	98%	57,20%	67,03%	31,67%	100%	51,67%	78,92%	93,33%	100%	100%	68%	81,47%	100%	31,67%	34,42%
58,13%	100%	27,20%	96%	51,67%	100%	50,53%	84,62%	93,33%	100%	33,33%	6%	86,67%	100%	25%	92,11%
58,13%	84,6%	40,53%	96%	58,33%	100%	36,67%	73,08%	100%	100%	33,33%	6%	66,67%	100%	22,80%	88,46%
00,47%	04,02%	100%	51,21%	50,33%	100%	30,00%	03,02%	100%	100%	30,07%	10%	00,07%	100%	50,33%	92,11%
54,17%	91,33%	30,23%	67,04%	50,00%	100%	59,12%	73,81%	90,07%	100%	33,33%	47%	81,12%	100%	34,42%	70,52%
(1)	(5)	(5)	(6)	(7)	(1)	(4)	(7)	(1)	(1)	(2)	(1)	(3)	(1)	(8)	(8)
36,43%	51,40%	50,00%	10,09%	50,00%	10,09%	3,78%	18,88%	42,47%	3,33%	5,78%	18,88%	42,47%	3,33%	5,78%	18,88%
(3)	(+)	(1)	(6)	(1)	(6)	(7)	(4)	(1)	(1)	(2)	(1)	(3)	(1)	(8)	(8)

Keterangan: angkadalam kurung merupakan peringkat yang diperoleh

Bank lain yang memiliki selisih lebih dari 30% adalah Bank Mega dan Bank Panin yang masing-masing memiliki selisih 36,48% dan 31,40%. Bank Bukopin dan BCA memiliki selisih dengan anak perusahaannya masing-masing sebesar 10,09% dan 3,78%. Bank dengan selisih pengungkapan yang paling rendah terdapat pada BSM dan Bank Mandiri yaitu hanya sebesar 3,33%. Kedua bank ini juga menjadi bank dengan tingkat pengungkapan paling tinggi dibandingkan bank umum dan BUS lainnya. Pertumbuhan Pengungkapan per Indikator pada Bank Umum disajikan pada tabel 7.

SIMPULAN, KETERBATASAN PENELITIAN, DAN SARAN UNTUK PENELITIAN BERIKUTNYA

Pengukuran praktik pengungkapan tata kelola perusahaan dengan menggunakan indikator Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 untuk Bank Umum Syariah dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 yang diperbarui menjadi Nomor 8/14/PBI/2006 untuk bank umum menemukan bahwa BUS masih jauh dari tingkat pengungkapan yang diharapkan. Dari delapan BUS yang diteliti, hanya ada tiga bank (38%) yang melakukan pengungkapan lebih dari 75%. Sementara dari seluruh BUK yang dijadikan sampel, semuanya melakukan pengungkapan dengan nilai lebih dari 75%. Penelitian ini juga menemukan rata-rata perkembangan pengungkapan selama empat tahun pada BUS hanya sebesar 6,27%. Angka ini cenderung kecil dan peningkatan yang terjadi cukup lambat mengingat potensi untuk meningkatkan nilai pengungkapan masih besar. Berbeda dengan BUK yang nilai pengungkapannya sudah cukup tinggi, persentase perkembangannya ada pada nilai 3,41%.

Temuan hasil perbandingan pada BUK dan BUS juga menunjukkan hasil yang unik. Bank Victoria dan Bank Victoria Syariah sama-sama memiliki tingkat pengungkapan paling rendah dibanding bank lainnya serta Bank Syariah

Mandiri dan Bank Mandiri sama-sama memiliki nilai pengungkapan paling tinggi dari seluruh indikator yang ada. Selisih pengungkapan paling tinggi antar BUS dan bank umum angkanya cukup besar yaitu sekitar 50%. Hal ini menggambarkan kesenjangan pengungkapan yang cukup lebar bahkan antara BUS dan bank umum yang saling terkait sekalipun.

Penelitian ini memiliki fokus pada seberapa besar pengungkapan yang dilakukan oleh BUS dan BUK yang memiliki hubungan induk-anak maupun yang sama-sama bernaung dalam satu *holding company* yang sama. Fokus penelitian adalah pada *mandatory disclosure* yang diatur dalam PBI Nomor 8/14/PBI/2006 untuk BUK dan PBI Nomor 11/33/PBI/2009 untuk BUS dan tidak meneliti *voluntary disclosure*. Selain itu penelitian ini juga tidak mengungkapkan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pengungkapan tata kelola.

Penelitian ini hanya menggunakan data laporan tahunan untuk melihat pengungkapan yang dilakukan perusahaan, sedangkan laporan

tahunan bukanlah satu-satunya alat yang digunakan perusahaan untuk dapat mengkomunikasikan hal-hal penting kepada para pemangku kepentingan. Selain itu, penelitian ini juga mengambil sampel dari BUK yang memiliki hubungan langsung dengan BUS untuk selanjutnya diperbandingkan tingkat pengungkapannya sehingga sampel yang digunakan terbatas.

Saran untuk penelitian selanjutnya bagi peneliti yang tertarik untuk mendalami bidang yang sama adalah dengan memperluas pembahasan mengenai pengungkapan tata kelola perusahaan seperti meneliti faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pengungkapan tata kelola pada suatu perusahaan. Selain itu penelitian dapat menambahkan *voluntary disclosure* sebagai hal yang juga diteliti atau menggunakan ketentuan baru, misal yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penelitian selanjutnya juga dimungkinkan untuk menambah sampel yang digunakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu-Tapanjeh, Abdussalam Mahmoud (2009). Corporate Governance from the Islamic Perspective: A Comparative Analysis with OECD Principles”, *Critical Perspectives on Accounting*, 20, 556–567.
- Adiono, Luthfi Cahyo dan Mahfud Sholihin (2014). “Analisis Pengungkapan Tata Kelola Bank Syariah Di Indonesia”, *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 18 (2), 268-227.
- Chatterjee, D. (2011). “A Content Analysis Study on Corporate Governance Reporting by Indian Companies”, *Corporate Reputation Review*, 14 (3), 234-246.
- Darmadi, Salim (2013). “Corporate Governance Disclosure in the Annual Report: An Explanatory Study on Indonesian Islamic Banks”, *Humanomics*, 29 (1), 4-23.
- Krippendorff, Klaus (1980). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*. Beverly Hills: Sage.
- Mehran, Hamid, Morrison, Alan, dan Joel Shapiro (2011). “Corporate Governance and Banks: What Have Learned from the Financial Crisis?”, *Federal Reserve Banks of New York Staff Reports*, no. 502.
- Organization for Co-Operation and Development. (2004). *OECD Principles of Corporate Governance*. Paris: OECD.
- Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum.
- Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum.

Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009
Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

(Footnotes)

¹ Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri telah membentuk Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) agar secara khusus menangani tata kelola di Indonesia, sementara MTI menginisiasi berdirinya *The Indonesian Institute for Corporate Governance*.